

PERKEMBANGAN KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN¹

1. Umum

Kemiskinan – baik secara kuantitas maupun kualitas – adalah tantangan pembangunan yang akan selalu dihadapi dan berusaha ditanggulangi oleh setiap negara karena berhadapan dengan perwujudan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan dari setiap proses pembangunan. Kemiskinan di Indonesia adalah kesenjangan kronis sejak 1960-an yang diperparah kondisi krisis sejak 1997. Kebijakan reguler sektoral dan regional sejak 1970-an hingga sekarang masih belum cukup mampu untuk menanggulangi kemiskinan (baik kuantitas maupun kualitas). Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin yang pada 2001 masih berkisar pada angka 37,3 juta jiwa. Kondisi kemiskinan ini membuat daya saing nasional terhadap dunia internasional melemah, yang pada gilirannya akan mengakibatkan turunnya harga diri tiap individu dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu masalah kemiskinan harus segera dituntaskan dan perlu mendapat perhatian serius semua pihak.

Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menuntaskan masalah kemiskinan karena penanggulangan kemiskinan merupakan amanah rakyat yang tertuang dalam tujuan nasional bangsa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan sendiri sebenarnya merupakan masalah multidimensi karena tidak hanya mencakup aspek-aspek ekonomi yang mengarah pada perwujudan kesejahteraan materi (*material well being*), namun juga mencakup aspek-aspek non ekonomi (social budaya, politik, hukum, keamanan) yang mengarah pada perwujudan kesejahteraan non-materi (*immaterial well being*). Tetapi perlu disadari bahwa pemerintah mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menuntaskan masalah kemiskinan yang bersifat multidimensi tersebut. Kendala organisasi, manajemen, dan keuangan merupakan bagian utama dari keterbatasan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah sangat berkepentingan mengajak dan mengkoordinasi semua unsur bangsa, mulai dari segenap jajaran pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota; pelaku usaha nasional; pelaku lembaga keuangan dan perbankan; perguruan tinggi; hingga masyarakat madani – termasuk di dalamnya lembaga pengembangan swadaya masyarakat/organisasi non-pemerintah, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik, untuk bergerak dan bersatu-padu memberantas kemiskinan. Sejalan dengan kebijaksanaan otonomi daerah, maka masyarakat daerah dan aparat pemerintahan propinsi dan pemerintahan kabupaten/kota merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan dan perwujudan harapan upaya penanggulangan kemiskinan.

¹ Dipersiapkan sebagai bahan Rakorbangsus, 16 – 17 September 2002.

2. Komite Penanggulangan Kemiskinan

Saat ini secara garis besar, terdapat tiga jalur pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, yaitu jalur pembangunan sektoral, regional, dan khusus. Masing-masing jalur mengandung berbagai macam pelaksanaan program yang sesuai dengan kategori program penanggulangan kemiskinan. Namun, implementasi program-program tersebut belum mampu menghasilkan sinergi, cenderung tumpang-tindih dan terkesan kurang terfokus baik dalam menetapkan sasaran program (siapa, apa, dimana, dan bagaimana) maupun penanggung jawabnya. Semua ini mengindikasikan perlunya koordinasi lintas pelaku dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, yaitu kemiskinan berkurang baik secara kuantitas maupun kualitas.

a. Pembentukan KPK

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 Tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2002, membentuk sebuah komite untuk penanggulangan kemiskinan yang secara khusus menyelenggarakan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia dengan melibatkan forum lintaspelaku yang meliputi forum nasional dan forum regional dan/atau forum nasional-regional, yang terdiri dari semua unsur bangsa mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah propinsi dan kabupaten, kota, lembaga keuangan dan perbankan, usaha nasional, dan kelompok swadaya masyarakat dalam menggalang kontribusi gagasan dan saran implementasi yang konstruktif dan maju yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan menurunkan populasi penduduk miskin dalam ukuran yang signifikan.

Komite penanggulangan kemiskinan bukanlah merupakan lembaga baru karena merupakan forum koordinasi yang mengkoordinasikan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan di semua jalur pembangunan dan di setiap lapisan penyelenggara pembangunan agar lebih tajam dan sinkron.

b. Fungsi

Fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan adalah sebagai berikut:

- (1) Merumuskan kebijakan dan program penanggulangan ke-miskinan dan Panduan Umum yang diperlukan bagi pelaksanaannya di daerah;
- (2) Memantau pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah dan memberikan panduan kebijakan lanjutan yang ditetapkan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing;
- (3) Membina pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- (4) Melaporkan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan kepada Presiden.

c. Strategi Pokok

Strategi pokok upaya penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk menurunkan populasi penduduk miskin dari sekitar 18,95% (atau sekitar 37,3 juta jiwa) di tahun 2001 menjadi sekitar 14% (atau sekitar 26,8 juta jiwa) di akhir tahun 2004. Strategi penanggulangan kemiskinan tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peranserta aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan social ekonomi, serta memperkuat martabat manusia dan bangsa.

Secara operasional strategi pemberdayaan masyarakat tersebut dilaksanakan melalui: (i) Upaya peningkatan produktivitas masyarakat miskin, yang mana masyarakat miskin memperoleh peluang, kemampuan pengelolaan, dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, social budaya, maupun politik; (ii) Upaya pengurangan pengeluaran masyarakat miskin dalam mengakses kebutuhan dasar, seperti: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi.

d. Kelompok Kerja

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan maka Komite Penanggulangan Kemiskinan mengagendakan langkah koordinasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dibagi ke dalam 7 kelompok kerja (pokja), yang meliputi:

- (1). Perencanaan Makro**, memberikan dukungan perencanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Dukungan perencanaan makro dikoordinasikan oleh jajaran **Bappenas**.
- (2). Lembaga Keuangan**, memberikan dukungan perencanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan termasuk perbankan. Dukungan lembaga keuangan dikoordinasikan oleh jajaran **Bank Indonesia** dengan melibatkan unsur Bank Rakyat Indonesia dan Departemen keuangan.
- (3). Usaha Nasional**, memberikan dukungan perencanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh usaha nasional terutama dari kalangan swasta (non-BUMN). Dukungan Usaha Nasional dikoordinasikan oleh suatu konsorsium usaha nasional yang ditunjuk secara demokratis untuk penanggulangan kemiskinan.
- (4). Data dan Informasi**, memberikan dukungan penyediaan data, informasi dan penerangan tentang penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah, perbankan nasional, dan usaha nasional. Dukungan data dan informasi dikoordinasikan oleh **Badan Pusat Statistik (BPS)** dengan melibatkan unsur Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

- (5). **Asistensi Program**, memberikan dukungan fasilitasi dan manajemen program dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota. Dukungan Asistensi Program dikoordinasikan oleh **Departemen Dalam Negeri** dengan melibatkan jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) lain yang diperlukan dan seluruh jajaran Gubernur Propinsi dan Bupati/Walikota.
- (6). **Pendampingan**, memberikan dukungan pendampingan kepada kelompok masyarakat miskin yang memanfaatkan program. Dukungan Pendampingan dikoordinasikan oleh konsorsium lembaga pengembangan swadaya masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan dan konsorsium perguruan tinggi untuk penanggulangan kemiskinan.
- (7). **Penelitian dan Pengembangan**, memberikan dukungan monitoring dan evaluasi independen serta penyempurnaan kebijakan-kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Dukungan Penelitian dan Pengembangan dikoordinasikan oleh konsorsium lembaga litbang untuk penanggulangan kemiskinan.

3. Agenda KPK

Sampai dengan Agustus 2002, Komite Penanggulangan Kemiskinan telah melaksanakan beberapa agenda yang dilakukan dengan cara mengkoordinasikan berbagai stakeholder yang tergabung dalam 7 pokja. Pemaparan mengenai kinerja dan agenda ke depan tujuh pokja KPK secara rinci, terdapat di lampiran 1.

4. Rekomendasi Kebijakan PK Nasional

Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan bentuk kristalisasi pembangunan nasional karena muara dari pembangunan adalah perwujudan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, yang berarti kemiskinan - baik secara kuantitatif dan kualitatif - berkurang. Sejalan dengan kesejahteraan masyarakat, kemiskinan sendiri merupakan fenomena multidimensional yang berarti mempunyai konsekuensi logis berupa aspek-aspek yang terkait di dalamnya. Kemiskinan mempunyai dua aspek yang saling terkait, dan saling menyatu yaitu aspek ekonomi atau materi (*material well being*) dan aspek non ekonomi atau immaterial yang meliputi social budaya, politik, hukum, keamanan dan ketertiban (*social well being*). Dalam kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan kedua hal tersebut harus terpenuhi dan ini berarti mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berangkat dari rangkaian pemikiran ini, maka dapat dikatakan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah pembangunan itu sendiri.

Sejalan dengan tantangan dan peluang yang selalu berubah secara dinamis serta dengan mengingat kekuatan dan kelemahan yang berdasar pada potensi diri dan pengalaman masa lalu maka pembangunan yang diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan mengalami perubahan paradigma, yaitu menjadi pembangunan yang menempatkan manusia tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga

sebagai subyek pembangunan yang mampu menentukan sendiri arah kehidupannya. Agar pembangunan yang berorientasi pada manusianya ini mampu menanggulangi kemiskinan dan akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan beberapa prasyarat, syarat, dan peran pemerintah.

- a. Prasyarat adalah kondisi yang diperlukan dan harus dipenuhi (*necessary condition*) dalam pencapaian arah pembangunan. Berbagai prasyarat itu adalah:
 - adanya akses masyarakat yang seluas-luasnya terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan,
 - adanya partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dalam pembangunan,
 - adanya mekanisme pengawasan yang memadai,
 - adanya manfaat (*benefit*) yang dapat dirasakan bersama secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.
- b. Syarat adalah sesuatu yang mendukung dan mencukupkan (*sufficient conditions*) dari pencapaian tujuan dan arah pembangunan. Beberapa syarat itu adalah:
 - adanya demokrasi dalam setiap sendi kehidupan masyarakat,
 - adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara,
 - adanya desentralisasi dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Peran pemerintah yang diperlukan dalam pencapaian arah dan tujuan pembangunan haruslah tegas sebagai fasilitator, regulator, dan supervisor pembangunan, dan bukan sebagai inisiator dan creator. Peran pemerintah yang baru ini harus diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, yang berarti meliputi " Pemihakan, Penyiapan, dan Perlindungan". Pembangunan haruslah dari, oleh, dan untuk rakyat, dan bukannya dari, oleh, dan untuk pemerintah atau sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan.

5. Penutup

Prasyarat, syarat, dan peran pemerintah dalam pembangunan tersebut akan berbaur dan berinteraksi dengan masyarakat madani yang merupakan elemen-elemen dalam pembangunan. Kolaborasi ini diharapkan mampu membentuk suatu aliansi yang mampu menghadapi berbagai tantangan internal dan global yang selalu berubah secara dinamis. Dan akhirnya aliansi ini mampu menghasilkan sinergi yang mampu meminimalkan atau bahkan menghilangkan kemiskinan (kuantitatif dan kuantitatif) dari muka bumi Indonesia, yang berarti kesejahteraan masyarakat yang menjadi amanah rakyat Indonesia mampu diwujudkan dengan usaha mandiri yang berkelanjutan. Jadi, impian untuk melihat Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, dan adil (juriteradil) bukanlah sekedar suatu impian kosong namun suatu impian yang layak, dan terus akan diperjuangkan oleh Bangsa Indonesia.

LAMPIRAN 1

**KEGIATAN KELOMPOK KERJA
KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

^{s/}a II/September 2002

No	Bidang Kerja	Koordinator	Sasaran KPK	Realisasi
1	Perencanaan Makro	Bappenas	<ul style="list-style-type: none">• Terciptanya koordinasi yang kondusif di antara para pelaku penanggulangan kemiskinan• Terciptanya iklim yang kondusif bagi pemerintahan yang baik dalam rangka penanggulangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none">• Dalam rangka penajaman program, KPK telah menerima Rekapitulasi Program Penanggulangan Kemiskinan th Anggaran 2002 dari Bappenas• Rapat pleno Komite PK tanggal 19 April 2002 memberi tugas kepada Bappenas untuk menyusun kebijakan dasar penanggulangan kemiskinan sampai ke tingkat daerah• Bersama-sama dengan TKP3KPK memfasilitasi penyusunan I-PRSP dengan melibatkan semua <i>stakeholder</i> terkait.
2	Lembaga Keuangan	Bank Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya partisipasi yang lebih luas bagi semua pihak terkait dalam rangka penanggulangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none">• Pada tanggal 22 April 2002 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara KPK (mewakili Pemerintah) dengan Bank Indonesia, dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah• Pembahasan mengenai RUU Keuangan Mikro pada rapat-rapat mengenai Temu Nasional Lembaga Keuangan Mikro sejak Mei sampai dengan sekarang• Telah diterbitkan buku berwarna jingga berjudul "Pedoman Umum Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Bantuan Teknis" Juli 2002• Saat ini realisasi kredit ke sektor UMKM telah mencapai 16 trilyun, dimana 5.4 trilyun diserap oleh usaha mikro, sedangkan sisanya diserap oleh usaha kecil, dan menengah• Sedang dirumuskan untuk membentuk sebuah "LKM Center"

No	Bidang Kerja	Koordinator	Sasaran KPK	Realisasi
				dalam rangka memberikan pelayanan satu atap kepada upaya pengembangan keuangan mikro di Indonesia.
3	Data dan Informasi	BPS	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya cara pandang dan persepsi yang sama mengenai penduduk miskin sebagai kelompok sasaran dan pelaku penanggulangan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Penjelasan peta kemiskinan di Indonesia yang dipaparkan oleh Kepala BPS tanggal 16 Januari 2002 • Pembuatan profil data-data kemiskinan oleh BPS yang telah diterima bulan Juni • BPS menyusun 3 buah buku mengenai "Data dan Informasi Kemiskinan". Buku 1 berisi tentang data dan informasi kemiskinan di tingkat propinsi, buku 2 berisi tentang data dan informasi kemiskinan di tingkat kabupaten, dan buku 3 tentang data dan informasi di departemen sektoral.
4	Asistensi Program	Depdagri	<ul style="list-style-type: none"> • Tumbuhnya kepedulian pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/ kota dan pemerintah desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah diadakan Rakor Penanggulangan Kemiskinan Propinsi, Kabupaten/ Kota se-Indonesia pada tanggal 13-26 Juni di Jakarta. • Depdagri melalui Surat Menteri Dalam Negeri no 412.6/ 164/ SJ tanggal 29 Juli 2002 telah mendorong pembentukan KPK tingkat Daerah. KPK Daerah yang terbentuk adalah KPK DI Yogyakarta dan Kabupaten Bulukumba, dan yang masih dalam tahap perkembangan untuk berdiri adalah KPK DKI Jakarta, KPK Grobogan, dan KPK Boyolali.
5	Usaha Nasional	Konsorsium usaha nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya partisipasi yang lebih luas bagi semua pihak terkait dalam upaya penanggulangan kemiskinan • Tumbuhnya kegiatan yang mengarah pada perlindungan sosial bagi kelompok miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tanggal 30 Januari telah diadakan rapat penentuan Pokja yang memilih Kadin sebagai koordinator Pokja Usaha nasional • Rapat pada tanggal 15 Agustus 2002 dengan tema "Peran Dunia Usaha dalam Penanggulangan Kemiskinan". Akan dilaksanakan lagi pada tanggal 10 September yang difasilitasi oleh Kadin.
6	Pendampingan	Konsorsium LPSM	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya partisipasi yang lebih luas bagi semua pihak terkait dalam penanggulangan kemiskinan • Tumbuhnya kegiatan yang mengarah pada perlindungan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja sama dengan Gema PKM (Gerakan Masyarakat Pengembangan Keuangan Mikro) dan Bank Indonesia, untuk mengadakan Temu Nasional dan Bazaar Keuangan Mikro pada bulan Juli 2002 di Jakarta • Juga melibatkan pihak lembaga pengembangan swadaya

No	Bidang Kerja	Koordinator	Sasaran KPK	Realisasi
			bagi kelompok miskin	masyarakat –misalnya KTNA, Altrabaku, Pinbuk, Lembaga Bina Swadaya- dalam kegiatan diatas. <ul style="list-style-type: none"> • Bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk membentuk sebuah lembaga pendampingan bagi pengembangan keuangan mikro melalui LKM Center.
7	Penelitian dan Pengembangan	Konsorsium Perguruan Tinggi	Meningkatnya partisipasi yang lebih luas bagi semua pihak terkait dalam penanggulangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi pada Workshop Penanggulangan Kemiskinan di UGM, Yogyakarta pada tanggal 20 April • Melibatkan pihak akademisi –yaitu dari LPM IPB- dalam pembahasan acara Temu Nasional yang diselenggarakan KPK-BI- Gema PKM, selama bulan Mei sampai dengan sekarang • Penyelenggaraan sarasehan nasional bertema “Microfinance dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan” di F-MIPA IPB, Bogor, tanggal 27 Agustus • Presentasi hasil penelitian mengenai “Studi Dampak Regulasi dan Instrumen Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Daerah terhadap Masyarakat Miskin Pengguna Layanan Publik dan Usaha Kecil dan Menengah”, pada tanggal 27 Agustus 2002 • Penyelenggaraan pelatihan bertema “Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Peningkatan Jiwa Kewirausahaan dengan Inovator Perguruan Tinggi”, di Universitas Widya Gama, Malang, tanggal 11-21 September 2002 • Presentasi hasil penelitian “Standard kehidupan di Indonesia Tiga Tahun Setelah Krisis: Hasil SAKERTI III” oleh tim PSKK UGM